

## ABSTRAK

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan dalam kegiatan perekonomian suatu Negara. Bank mempunyai 2 fungsi utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut industri perbankan menghadapi situasi yang kompleks dari kegiatan usaha bank, sehingga industri perbankan wajib dilengkapi dengan regulasi yang ketat. Salah satu kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat infrastruktur dan sistem pengelolaan perbankan adalah dengan melakukan upaya penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan untuk semua bank yang ada di Indonesia. Berdasarkan peraturan OJK tersebut, maka semua BPR yang berada di seluruh wilayah Indonesia wajib memberikan laporan mengenai penerapan manajemen risiko, tidak terkecuali dengan PT. BPR Bintara Pratama Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun bentuk kerangka manajemen risiko yang mencakup pengawasan direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit, kecukupan proses dan sistem, dan sistem pengendalian intern yang tepat untuk PT. BPR Bintara Pratama Sejahtera sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 dan untuk menyusun bentuk rancangan penerapan manajemen risiko yang mencakup struktur organisasi, sistem informasi manajemen, dan sistem pengendalian intern sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2015. Rancangan penerapan manajemen risiko BPR tersebut digunakan untuk mengelola risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional BPR.

**Kata kunci:** Kerangka Manajemen Risiko, PT. BPR Bintara Pratama Sejahtera, Rancangan Penerapan Manajemen Risiko, POJK

## ABSTRACT

*Bank is a financial institution that have a role in the economic activities of a State. The Bank has two main functions: collecting funds and distributing funds to the public. Based on these functions the banking industry faces a complex situation of the bank's business activities, so the banking industry must be equipped with strict regulation. One of the policies of the Financial Services Authority (OJK) to strengthen the banking system and infrastructure is to implement risk management and corporate governance for all banks in Indonesia. Under these OJK regulations, all BPR located in all parts of Indonesia are required to provide reports on the application of risk management, including PT. BPR Bintara Pratama Sejahtera. This study aims to form a risk management framework that includes supervision of directors and board of commissioners, adequacy of policies, procedures, and limits, adequacy of processes and systems, and appropriate internal control system for PT. BPR Bintara Pratama Sejahtera in accordance with POJK No.13/POJK.03/2015 and to formulate the design of risk management application which includes organizational structure, management information system and internal control system in accordance with POJK No.13/POJK.03/2015. The design of risk management implementation is used to manage the risks that arise in BPR operations.*

**Keywords:** Risk Management Framework, PT. BPR Bintara Pratama Sejahtera, Risk Management Implementation Plan, POJK